

DAFTAR KERUGIAN NEGARA

TRIWULAN :

TAHUN :

KANTOR :

No	Nama Pelaku	No./Tgl/SKT JM/ SK Pembebanan Sementara /SK Pembebanan	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Negara (Rp)	Jml.Pembayaran /Angsuran s.d Bulan...(Rp)	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....
Instansi,

(.....)

Petunjuk pengisian:

1. Diisi dengan nomor urut
2. Diisi dengan nama Pelaku yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara
3. Diisi dengan nomor/tanggal SKTJM/SK Pembebanan Sementara/SK Pembebanan (bila ada)
4. Diisi dengan uraian kasus/tahun kejadian
5. Diisi dengan jumlah kerugian negara (dalam rupiah)
6. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh instansi dari Bendahara
7. Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6
8. Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada)
9. Diisi dengan :
 - Pelaksanaan SKTJM misal lunas tunai atau melalui penjualan barang;
 - Pelaksanaan SK Pembebanan Sementara, misal telah belum dilaksanakan sita jaminan;
 - Pelaksanaan SK Pembebanan misal tunai atau penyitaan dan penjualan barang.

Contoh Format 2



MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Jakarta,

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Laporan Hasil Verifikasi

Kepada
Yth. Ketua BPKRI
di-

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan bendahara a.n.....yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp..... pada tanggal.....

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, kami telah melakukan beberapa tindakan sebagai berikut:

- 1.
- 2.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;
- d. fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
- e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian kami sampaikan, untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap yang bersangkutan.

Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,

(.....)

Petunjuk pengisian :

- 1) Diisi dengan nama organisasi/ satuan kerja tempat teradinya kekurangan uang/barang
- 2) Diisi dengan tindakan pengamanan yang telah dilakukan antara lain:

penyegelan brankas, penutupan BKU dan Buku Pembantu dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas serta laporan kepada aparat yang berwenang

ContohFormat 3

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : 1)
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Tempat/tanggal lahir :
 Alamat :
 No dan tanggal SK Pengangkatan
 Sebagai Bendahara :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Negara sebesar Rp.2) (dengan huruf), yakni kerugian yang disebabkan:2).....

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara di 3) dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1.
2. 4)
3.

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....5)

Mengetahui,
 meterai

Kepala (satuan kerja)6)(Nama Bendahara)

(.....)

Saksi-saksi:

1. 7)
2.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap Bendahara yang menandatangani SKTJM .
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
- 3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara dimana uang tersebut akan disetorkan.
- 4) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian negara.
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
- 6) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Kepala Satker.
- 7) Diisi dengan dua orang saksi dari pemeriksa BPK atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikutmenyaksikan penandatanganan SKTJM ini.